

# **KELEMBAGAAN AGRIBISNIS PADA DESA BERBASIS KOMODITAS PERKEBUNAN**

Wahyuning K. Sejati dan Herman Supriadi

## **PENDAHULUAN**

Kelembagaan merupakan organisasi atau kaidah baik formal maupun informal yang mengatur perilaku dan tindakan masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Dari beberapa hasil kajian, Syahyuti (2006) menyimpulkan bahwa kelembagaan memiliki perhatian utama pada perilaku yang berpola, yang sebagian besar berasal dari norma-norma yang dianut. Kelembagaan berpusat pada tujuan, nilai atau kebutuhan sosial utama. Lebih jauh dikatakan bahwa kelembagaan mengacu kepada suatu prosedur, kepastian, dan panduan untuk melakukan sesuatu.

Handayani (2013) menyebutkan bahwa kelembagaan mengandung dua pengertian, yaitu institusi dan nilai/norma: sebuah institusi yang di dalamnya terkandung nilai/norma. Nilai dan norma yang ada dalam institusi inilah yang mengatur jalannya institusi tersebut. Sementara, agribisnis merupakan bisnis dalam sektor pertanian baik dari hulu hingga hilir yang mencakup seluruh aktivitas yang meliputi produksi, penyimpanan, pemasaran, prosesing bahan dasar dari usaha tani, serta suplai input dan penyediaan pelayanan penyuluhan, penelitian, dan kebijakan. Jadi kelembagaan agribisnis adalah institusi yang terkait dengan agribisnis atau bisnis pertanian yang di dalam institusi tersebut terdapat nilai-nilai dan norma yang mengaturnya. Dalam agribisnis lahan kering berbasis perkebunan terdapat berbagai kelembagaan di antaranya kelembagaan sarana produksi, kelembagaan pemasaran, dan kelembagaan penyuluhan.

Peran kelembagaan petani dalam mendukung keberlanjutan pertanian sangat diperlukan untuk memberikan masukan dan pertimbangan bagi pelaku pembangunan dalam rangka pengembangan ekonomi lokal (Noviatirida, 2011). Dalam melakukan usaha taninya petani mempunyai hubungan kerja dengan lembaga-lembaga pendukungnya, seperti kelompok tani, pedagang saprodi, pedagang hasil pertanian, penyuluh, koperasi, bank, dan pemerintah daerah (Cahyono dan Tjokropandojo, 2012).

Lembaga pemasaran dalam distribusi hasil pertanian dalam usaha tani merupakan badan usaha atau individu yang menyelenggarakan pemasaran, menyalurkan jasa dan komoditas pertanian dari produsen kepada konsumen akhir serta memiliki hubungan dengan badan usaha atau individu lainnya. Keberadaan lembaga pemasaran dikarenakan oleh dorongan atau keinginan konsumen untuk mendapatkan komoditas yang sesuai dengan waktu, tempat, dan bentuk yang diinginkan. Timbal balik dari konsumen adalah memberikan balas jasa kepada lembaga pemasaran berupa margin pemasaran (Zulfahmi, 2012).

Makalah ini bertujuan untuk melihat dinamika kelembagaan agribisnis tanaman perkebunan di agroekosistem lahan kering. Kelembagaan agribisnis yang

dikaji meliputi kelembagaan sarana produksi, kelembagaan pemasaran, dan kelembagaan kelompok tani dan penyuluhan.

## **METODE ANALISIS**

Penelitian ini memanfaatkan data hasil survei Panel Petani Nasional (Patanas) yang dilakukan oleh Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) pada tahun 2009 dan 2012. Patanas merupakan penelitian yang bersifat panel dan dirancang untuk memantau berbagai perubahan jangka panjang yang terjadi pada rumah tangga di perdesaan. Penelitian ini dilaksanakan di delapan desa dengan basis komoditas perkebunan, yaitu kakao di Provinsi Sulawesi Selatan, karet di Provinsi Jambi dan Kalimantan Barat, kelapa sawit di Provinsi Jambi dan Kalimantan Barat, dan tebu di Provinsi Jawa Timur. Jumlah responden petani di masing-masing desa sebanyak 32–40 responden.

Analisis kelembagaan agribisnis difokuskan pada aksesibilitas petani terhadap kelembagaan sarana produksi, kelembagaan pemasaran hasil panen petani, kelembagaan kelompok tani dan penyuluhan. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan tabulasi silang. Untuk melihat perubahan, beberapa aspek kelembagaan agribisnis dianalisis pada dua periode, yaitu tahun 2009 dan 2012.

## **KELEMBAGAAN SARANA PRODUKSI**

Kelembagaan sarana produksi pada dasarnya digunakan untuk meningkatkan aksesibilitas petani secara fisik maupun secara finansial terhadap input yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini aspek yang dilihat dalam kelembagaan sarana produksi meliputi ketersediaan input usaha tani yang dibutuhkan berdasarkan pernyataan petani, cara pembelian input, serta cara pembayaran input usaha tani oleh petani.

Tabel 1 menyajikan persentase petani yang menyatakan bahwa input usaha tani yang dibutuhkan tersedia pada dua titik waktu, yaitu tahun 2009 dan 2012. Input usaha tani yang dilihat, yaitu ketersediaan bibit unggul, pupuk anorganik, dan pestisida pada berbagai komoditas perkebunan. Bibit merupakan salah satu faktor penting untuk memperoleh produktivitas yang tinggi. Secara agregat terjadi peningkatan ketersediaan bibit unggul, meskipun relatif kecil. Peningkatan terbesar dalam hal ketersediaan bibit terjadi pada komoditas tebu (6,8%) dan kakao (5,6%). Hal yang menarik terjadi pada tanaman sawit, di mana pada tahun 2009 dan 2012 tidak ada petani yang menyatakan adanya ketersediaan bibit di lokasi penelitian. Hal ini disebabkan karena tanaman sawit sudah menghasilkan dan belum waktunya peremajaan lagi, sehingga petani belum membutuhkan bibit. Di samping itu, terdapat beberapa petani di Desa Hibun yang menjalin kerja sama dengan perusahaan swasta sehingga kebutuhan sarana didapatkan dari perusahaan inti yang menjadi mitranya. Pada komoditas karet, pada tahun 2012 tanaman karet

sudah menghasilkan dan petani belum memerlukan bibit karena belum waktunya peremajaan tanaman sehingga bibit tidak tersedia di lokasi penelitian.

Dinamika ketersediaan pupuk dan pestisida menunjukkan bahwa pada tahun 2012 terjadi penurunan pada semua komoditas, kecuali pada tebu yang meningkat pada tahun 2012. Berkurangnya ketersediaan pupuk dan pestisida dikarenakan petani tidak banyak melakukan pemupukan dan pemberantasan hama pada tanaman perkebunannya. Hal ini juga dikarenakan tidak pada semua lokasi penelitian terdapat kios saprodi. Bila dilihat pada masing masing desa maka keberadaan kios saprodi di Jawa dan luar Jawa nampak berbeda. Di Jawa persepsi petani tentang keberadaan kios saprodi di desa lokasi penelitian cukup tinggi, sementara di luar Jawa keberadaan kios saprodi hanya terdapat di Batanghari dan Luwu.

Tabel 1. Petani yang Menyatakan Bahwa Input Usaha Tani yang Dibutuhkan Selalu Tersedia Menurut Wilayah Komoditas Basis, 2009–2012 (% Petani)

Wilayah Komoditas Basis	Bibit Unggul			Pupuk Kimia			Pestisida		
	T0	T1	P	T0	T1	P	T0	T1	P
Karet	12,1	0	-12,1	47,5	29,9	-17,6	3	0	-3
Kakao	3,2	8,8	5,6	71,9	63,2	-8,7	59,4	43,9	-15,5
Kelapa sawit	0	0	0	72	0	-72	2	0	-2
Tebu	18,2	25	6,8	81,8	86,4	4,6	13,6	11,4	-2,2
Rata-rata	8,4	8,5	0,1	68,3	44,9	-23,4	19,5	13,8	-5,7

Keterangan: T0 = tahun 2009; T1 = tahun 2012; P = perubahan

Kecukupan sarana produksi sangat terkait dengan keberadaan kios sarana di desa. Di wilayah penelitian secara agregat persentase kecukupan bibit sangat rendah, kecuali di Malang. Hal ini karena tanaman perkebunan merupakan tanaman tahunan, sehingga permintaan bibit relatif kecil. Secara agregat kecukupan sarana produksi paling tinggi, yaitu pada pupuk kimia dan pestisida. Pada komoditas tebu baik di Malang maupun Lumajang, ketersediaan pupuk kimia, pupuk organik, dan herbisida di desa cukup tinggi. Di pihak lain, untuk komoditas kelapa sawit, karena di desa penelitian tidak tersedia kios saprodi, kebutuhan sarana produksi di desa tidak tercukupi. Upaya yang dilakukan oleh petani apabila sarana produksi tidak tercukupi di desa, yaitu dengan membeli di luar desa atau di luar kecamatan. Untuk bibit, pembelian dilakukan di luar kecamatan dan di luar kabupaten, sementara untuk pupuk kimia dan pestisida sebagian besar sudah dapat dicukupi dari luar desa dan luar kecamatan pada kabupaten yang sama.

Pembelian input usaha tani dilakukan melalui dua cara, yaitu secara tunai dan membayar setelah panen. Tabel 2 menunjukkan bahwa secara agregat pembelian sarana produksi secara tunai lebih sering dilakukan oleh petani, baik untuk bibit, pupuk, maupun pestisida. Demikian juga bila dilihat dari dinamikanya, nampak bahwa pembayaran secara tunai tetap memiliki persentase yang lebih besar dibanding dengan pembayaran setelah panen. Namun, bila dilihat pada masing

masing komoditas nampak bahwa pada komoditas kelapa sawit terjadi perubahan yang cukup signifikan di mana pada pembelian pupuk yang pada tahun 2009 dilakukan setelah panen, berubah menjadi pembayaran secara tunai pada tahun 2012.

Tabel 2. Cara Pembelian Input Usaha Tani Menurut Wilayah Komoditas Basis, 2009–2012 (% Petani)

Wilayah Komoditas Basis	Benih/Bibit			Pupuk Anorganik			Pestisida/Herbisida		
	2009	2012	P	2009	2012	P	2009	2012	P
Karet									
a. Tunai	100,0	100,0	0,0	100,0	95,6	-4,4	100,0	95,8	-4,2
b. Dibayar setelah panen	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	4,4	0,0	4,2	4,2
Kakao									
a. Tunai	80,0	95,0	15,0	83,3	75,5	-7,8	95,1	87,5	-7,6
b. Dibayar setelah panen	20,0	5,0	-15,0	16,7	24,5	7,8	4,9	12,5	7,6
Kelapa sawit									
a. Tunai	100,0	100,0	0,0	25,0	70,2	45,2	0,0	83,3	83,3
b. Dibayar setelah panen	0,0	0,0	0,0	75,0	29,8	-45,2	0,0	16,7	16,7
Tebu									
a. Tunai	66,7	100,0	33,3	46,1	35,9	-10,2	100,0	100,0	0,0
b. Dibayar setelah panen	33,3	0,0	-33,3	53,9	64,1	10,2	0,0	0,0	0,0
Rata-rata									
a. Tunai	86,7	98,8	12,1	63,6	69,3	5,7	73,8	91,7	17,9
b. Dibayar setelah panen	13,3	1,3	-12,1	36,4	30,7	-5,7	1,2	8,4	7,1

Keterangan: P = perubahan

Cara pembayaran sarana produksi yang dilakukan setelah panen dapat dikategorikan dalam empat kelompok, yaitu (1) ditukar dengan hasil panen; (2) dibayar dengan uang, tetapi harganya lebih mahal dibanding harga yang dibayar tunai; (3) dibayar dengan uang, tetapi hasil panen harus dijual ke pedagang tersebut; dan (4) dibayar dengan uang dan hasil panen boleh dijual ke siapa saja, tetapi nilai pinjaman sarana produksi dikenakan bunga. Tabel 3 menunjukkan bahwa cara pembayaran input setelah panen berbeda antarwilayah komoditas basis. Pada wilayah dengan komoditas basis karet, kakao, dan kelapa sawit, cara membayar sarana produksi setelah panen adalah dibayar dengan uang, tetapi harganya lebih mahal dibanding harga yang dibayar tunai. Cara ini dianggap paling memudahkan bagi petani karena petani merasa bebas menjual ke pedagang manapun yang paling dianggap menguntungkan. Pada komoditas tebu, meskipun paling banyak petani membayar hasil dengan uang, tetapi harganya lebih mahal dibanding harga yang dibayar tunai. Cara pembayaran sarana produksi, baik yang dilakukan dengan cara ditukar hasil panen, ataupun dibayar dengan uang, namun

hasil panennya tetap dijual ke pedagang tersebut, masih banyak dilakukan. Dilihat dari dinamika secara agregat nampak adanya peningkatan pada tahun 2008. Namun untuk cara ke tiga dan keempat perubahan yang terjadi cenderung menurun.

Tabel 3. Cara Pembayaran Input Usaha Tani Jika Dibayar Setelah Panen Menurut Wilayah Komoditas Basis, 2009–2012 (% Petani)

Wilayah Komoditas Basis	Cara Pembayaran <sup>1)</sup>			
	1	2	3	4
Tahun 2009				
- Karet	0	100	0	0
- Kakao	5,6	72,2	5,6	16,7
- Kelapa sawit	0	66,7	27,8	5,5
- Tebu	0	47,1	47,1	5,8
Rata-rata	1,4	71,5	20,1	7
Tahun 2012				
- Karet	0	100	0	0
- Kakao	0	100	0	0
- Kelapa sawit	4,8	76,2	19	0
- Tebu	29,6	40,8	25,9	3,7
Rata-rata	8,6	79,3	11,2	0,9
Perubahan				
- Karet	0	0	0	0
- Kakao	-5,6	27,8	-5,6	-16,7
- Kelapa sawit	4,8	9,5	-8,8	-5,5
- Tebu	29,6	-6,3	-21,2	-2,1
Rata-rata	7,2	7,8	-8,9	-6,1

<sup>1)</sup> Keterangan:

1 = ditukar dengan hasil panen

2 = dibayar dengan uang, tetapi harganya lebih mahal dibanding harga yang dibayar tunai

3 = dibayar dengan uang, tetapi hasil panen harus dijual ke pedagang tersebut

4 = dibayar dengan uang, dan hasil panen boleh dijual ke siapa saja, tetapi nilai pinjaman sarana produksi dikenakan bunga

## KELEMBAGAAN PEMASARAN HASIL PANEN PETANI

Kelembagaan pemasaran mempunyai arti penting dalam pendistribusian hasil panen hingga ke konsumen. Cara penjualan hasil panen di wilayah perkebunan biasa dilakukan melalui borongan atau dijual per satuan. Penjualan secara ijon pada saat ini sudah jarang sekali dilakukan di wilayah penelitian. Tabel 4 menyajikan persentase petani menurut cara penjualan hasil panennya. Aksebililitas petani terhadap kelembagaan pemasaran cukup besar karena tersedianya sarana dan prasarana pendukung pemasaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar petani menjual hasil panen kebunnya dengan cara per satuan/unit produk, kecuali pada komoditas tebu. Dari dua titik waktu juga nampak bahwa pada tahun 2012, penjualan per satuan meningkat dibanding tahun 2009. Hal ini diduga karena pendapatan yang diperoleh petani dengan cara penjualan per satuan produk bisa lebih besar. Berbeda dengan komoditas lain, penjualan hasil pada komoditas tebu tahun 2009 persentase penjualan dengan cara borongan lebih tinggi dibandingkan penjualan per satuan produk, tetapi pada tahun 2012 terjadi perubahan yang cukup signifikan, di mana penjualan per satuan unit menjadi lebih dominan. Alasan yang dikemukakan petani tebu tersebut adalah pada penjualan secara borongan akan menghemat tenaga kerja di samping bisa cepat mendapatkan uang. Pada komoditas lain, yaitu karet, kakao, dan sawit perubahan yang terjadi pada tahun 2012 relatif kecil.

Tabel 4. Petani yang Menjual Hasil Panennya Secara Tebasan/Ijon dan Alasannya, Menurut Wilayah Komoditas Basis, 2009–2012 (% petani).

Wilayah Komoditas Basis	Cara Penjualan Hasil	
	Borongan	Per Unit
Tahun 2009		
- Karet	1,6	98,4
- Kakao	5,4	94,6
- Kelapa sawit	9,1	90,9
- Tebu	53,1	46,9
Rata-rata	17,3	82,7
Tahun 2012		
- Karet	0,0	100,0
- Kakao	3,4	96,6
- Kelapa sawit	0,0	100,0
- Tebu	22,2	77,8
Rata-rata	6,4	93,6
Perubahan		
- Karet	-1,6	1,6
- Kakao	-2,0	2,0
- Kelapa sawit	-9,1	9,1
- Tebu	-30,9	30,9
Rata-rata	-10,9	10,9

Pola pemasaran di wilayah perkebunan sangat bervariasi antarkomoditas. Tabel 5 menyajikan pola pemasaran hasil panen petani menurut kategori pedagang pembeli berdasarkan wilayah komoditas basis. Jenis pedagang pembeli dapat dikelompokkan menjadi enam kategori, yaitu pedagang pengumpul desa, industri pengolahan, pedagang besar desa, pedagang besar kecamatan, pedagang besar kabupaten, dan lainnya. Tabel 5 menunjukkan bahwa sebagian besar (60%) petani

pada tahun 2009 menjual hasil panennya ke pedagang pengumpul desa, namun dinamika penjualan ini menurun 16,7% pada tahun 2012. Selanjutnya, penjualan hasil sangat bervariasi antarkomoditas. Pada komoditas kakao, selain pada pedagang pengumpul desa, penjualan dilakukan pada pedagang besar di tingkat kecamatan. Demikian juga pada komoditas karet pada tahun 2009, namun pada tahun 2012 terjadi perubahan di mana petani lebih banyak menjual hasil pada industri pengolahan.

Tabel 5. Pola Pemasaran Hasil Panen Petani Menurut Kategori Pedagang Pembeli, Menurut Wilayah Komoditas Basis, 2009–2012 (% petani).

Wilayah Komoditas Basis	Kategori Pembeli Hasil Panen Petani <sup>1)</sup>					
	1	2	3	4	5	6
Tahun 2009						
- Karet	59,1	3,0	10,6	16,7	10,6	0,0
- Kakao	54,0	11,6	14,3	30,2	0,0	0,0
- Kelapa sawit	63,6	0,0	6,1	3,0	0,0	27,3
- Tebu	66,7	0,0	0,0	0,0	11,1	22,2
Rata-rata	60,9	3,7	7,8	12,5	5,4	12,4
Tahun 2012						
- Karet	57,1	11,7	3,9	3,9	20,8	5,6
- Kakao	48,3	1,7	1,7	45,0	3,3	0,0
- Kelapa sawit	65,5	0,0	0,0	1,8	0,0	32,7
- Tebu	5,7	2,9	0,0	20,0	0,0	71,4
Rata-rata	44,2	4,1	1,4	17,7	6,0	27,4
Perubahan						
- Karet	-2,0	8,7	-6,7	-12,8	10,2	5,6
- Kakao	-5,7	-9,9	-12,6	14,8	3,3	0,0
- Kelapa sawit	1,9	0,0	-6,1	-1,2	0,0	5,4
- Tebu	-61,0	2,9	0,0	20,0	-11,1	49,2
Rata-rata	-16,7	0,4	-6,4	5,2	0,6	15,1

<sup>1)</sup> Keterangan:

1 = pedagang pengumpul desa    2 = industri pengolahan    3 = pedagang besar desa  
 4 = pedagang besar kecamatan    5 = pedagang besar kabupaten    6 =lainnya

## KELEMBAGAAN KELOMPOK TANI DAN PENYULUHAN

Kelompok tani merupakan wadah dalam mengorganisir berbagai kegiatan usaha tani dalam satu wilayah. Keberadaan kelompok tani hampir ada pada setiap desa pertanian, meskipun dengan persentase yang sangat berbeda. Tabel 6 menyajikan keberadaan kelompok tani pada lokasi penelitian. Secara agregat jumlah petani yang mengetahui keberadaan kelompok tani pada tahun 2009 dan

2012 relatif sama. Namun bila dilihat dari persentase pada masing masing kabupaten, nampak sangat beragam. Di Batanghari, Sanggau (untuk wilayah sawit), Muaro Jambi, dan Malang keberadaan kelompok tani pada tahun 2009 dan 2012 relatif sama, tidak banyak perubahan. Namun, untuk wilayah penelitian lainnya kondisi pada tahun 2009 berbeda dengan tahun 2012. Sebagai contoh, di Sanggau, wilayah penelitian dengan basis karet, keberadaan kelompok tani relatif rendah, bahkan pada tahun 2012 persentasenya menurun dari 26 persen menjadi 8 persen. Hal yang positif terjadi di Luwu, daerah perkebunan kakao, di mana keberadaan kelompok tani meningkat tajam dari 35% pada tahun 2009 menjadi 93% pada tahun 2012. Hal yang berbeda sekali terjadi di Sanggau, di mana pada wilayah dengan basis kelapa sawit, keberadaan kelompok tani adalah 100%, sementara untuk di wilayah dengan basis karet keberadaan kelompok tani hanya 26%. Demikian juga terjadi di Lumajang, keberadaan kelompok tani pada wilayah perkebunan tebu relatif rendah, meskipun sudah terjadi peningkatan 10% pada tahun 2012.

Tabel 6. Petani Anggota Kelompok Tani dan Persepsi Tentang Manfaat Menjadi Anggota Kelompok Tani, Menurut Wilayah Komoditas Basis, 2009–2012 (% Petani)

Wilayah Komoditas Basis	Keberadaan Kelompok Tani	Petani Anggota Kelompok Tani	Manfaat Menjadi Anggota Kelompok Tani				
			1	2	3	4	5
Tahun 2009							
- Karet	51,5	22,7	15,4	61,5	0	0	23,1
- Kakao	57,8	32,8	14,3	28,6	0	0	57,1
- Kelapa sawit	72,0	56,0	63,3	0	16,7	0	20,0
- Tebu	77,3	63,6	10,5	10,5	0	42,1	36,9
Rata-rata	64,6	43,8	25,9	25,1	4,2	10,5	34,3
Tahun 2012							
- Karet	49,3	19,5	30,4	39,1	8,7	8,7	13,1
- Kakao	63,2	45,6	6,9	31,0	3,4	17,3	41,4
- Kelapa sawit	70,9	41,8	50,0	23,9	14,3	9,5	2,3
- Tebu	75,0	52,3	16,7	4,2	12,5	54,1	12,5
Rata-rata	64,6	39,8	26,0	24,5	9,7	22,4	17,3
Perubahan							
- Karet	-2,2	-3,2	15	-22,4	8,7	8,7	-10,0
- Kakao	5,4	12,8	-7,4	2,4	3,4	17,3	-15,7
- Kelapa sawit	-1,1	-14,2	-13,3	23,9	-2,4	9,5	-17,7
- Tebu	-2,3	-11,3	6,2	-6,3	12,5	12,0	-24,4
Rata-rata	-0,1	-4,0	0,1	-0,6	5,6	11,9	-16,9

<sup>1)</sup> Keterangan:

1 = meringankan pekerjaan (gotongroyong)

2 = sarana tukar pikiran

3 = sarana keuangan (tabungan/pinjaman, arisan, dsb.)

4 = membantu akses terhadap kredit

5 = lainnya



Ketidakberdayaan masyarakat perdesaan salah satunya merupakan akibat kebijakan yang *mismatch* di masa lalu, yaitu kebijakan yang melupakan sektor pertanian sebagai dasar keunggulan komparatif maupun kompetitif (Syahza, 2011). Bagi pemerintah Indonesia, pembangunan perdesaan selama ini mengacu kepada pembangunan sektor pertanian dan kemudian dikembangkan dalam bentuk agribisnis. Faktor yang mendukung prospek pengembangan agribisnis untuk masa datang antara lain (1) penduduk yang semakin bertambah sehingga kebutuhan pangan juga bertambah, ini merupakan peluang pasar yang baik bagi pelaku agribisnis; (2) meningkatnya pendapatan masyarakat akan meningkatkan kebutuhan pangan berkualitas dan beragam (diversifikasi), yang menuntut adanya pengolahan hasil (agroindustri); dan (3) perkembangan agribisnis juga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, meningkatkan pendapatan petani, yang pada akhirnya diharapkan akan mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat.

Dari jumlah petani yang mengetahui keberadaan kelompok tani, tidak seluruhnya menjadi anggota kelompok tani. Dinamika keanggotaan kelompok tani pada tahun 2009 dan 2012 terlihat beragam antarwilayah. Secara rata-rata terdapat penurunan persentase petani yang menjadi anggota kelompok dari 43,8% pada tahun 2007 menjadi 39,8% tahun 2010. Hanya pada wilayah basis kakao terdapat kenaikan (12,8%) petani menjadi anggota kelompok. Menurunnya minat petani menjadi anggota kelompok di wilayah basis karet, kelapa sawit, dan tebu karena kesibukan masing-masing individu petani yang merasa waktunya sangat berharga untuk melakukan kegiatan produktif usaha taninya dibandingkan untuk menghadiri pertemuan-pertemuan kelompok, apalagi ada iuran atau sumbangan dan sebagainya.

Manfaat yang diperoleh petani sebagai anggota kelompok tani ternyata berbeda menurut wilayah berbasis komoditas. Pada wilayah berbasis karet dengan adanya kelompok maka kegiatan usaha tani menjadi ringan karena dikerjakan secara gotong royong, terlihat pada tabel bahwa nilai perubahan positif paling tinggi (15%) ada pada manfaat pekerjaan menjadi lebih ringan. Manfaat lain yang dirasakan petani karet adalah aksesibilitas simpan pinjam, arisan, dan kredit (masing-masing 8,7%). Pada kelompok karet ini terjadi penurunan aktivitas tukar pikiran dalam kelompok, kemungkinan karena keterbatasan waktu atau tidak ada masalah usaha tani karet yang perlu didiskusikan dalam kelompok. Gotong royong yang dikerjakan secara rutin untuk segala kegiatan usaha tani akan meningkatkan kepercayaan antaranggota dan dengan pengurus kelompok serta menciptakan kerukunan masyarakat.

Petani kakao merasakan adanya perubahan peningkatan manfaat keberadaan kelompok terutama dalam hal mendapatkan akses kredit (17,3%), kemudian akses simpan pinjam (3,4%), dan sarana tukar pikiran (2,4%). Perubahan tersebut menunjukkan bahwa modal usaha pinjaman semakin dibutuhkan petani individu untuk pembelian bibit, pupuk, pembukaan lahan, dan pengendalian hama penyakit. Tukar pikiran dalam forum kelompok juga meningkat terkait dengan permasalahan hama/penyakit pada buah kakao. Hal yang kurang baik terjadi pada kelompok adalah semakin turunnya rasa kebersamaan (gotong royong), yang disebabkan oleh

kesibukan masing-masing individu petani. Petani kakao merasa bahwa kegiatan usaha tani cukup dilakukan oleh masing-masing keluarga petani. Hal tersebut sangat disayangkan karena berpengaruh buruk kepada upaya pengembangan kakao. Damanik dan Herman (2010) menyatakan ada delapan faktor strategis yang memengaruhi pengembangan perkebunan kakao berkelanjutan, yaitu ketersediaan teknologi, tenaga pembina, pelatihan petani, dukungan kebijakan, luas kebun petani, keterampilan petani, kelembagaan petani, produksi, dan produktivitas.

Perubahan positif yang nyata dari tahun 2009 ke 2012 pada kelompok usaha tani kelapa sawit adalah meningkatnya sarana tukar menukar pikiran (23,9%). Besarnya perubahan tersebut menunjukkan bahwa dinamika kelompok berkembang dengan semakin seringnya pertemuan anggota untuk membahas permasalahan dan kebutuhan petani. Selain itu, anggota merasakan bahwa akses terhadap kredit dibantu dengan adanya kelompok (9,5%). Sangat disayangkan bahwa dalam jangka waktu tiga tahun (2009–2012) kegotongroyongan dan akses simpan pinjam dalam kelompok justru berkurang. Persepsi anggota dalam hal ini adalah yang penting kelompok bisa sebagai sarana tukar pikiran (pertemuan kelompok) dan ada akses simpan pinjam menurut kemampuan dan kebutuhan.

Pada komoditas basis tebu di Jawa Timur anggota merasakan perubahan manfaat paling dominan adanya kelompok terutama dalam hal sarana keuangan (tabungan/simpan pinjam, dan arisan), yaitu sebesar 12,5%, kemudian tidak jauh berbeda adalah manfaat dalam meningkatkan akses kredit (12%). Terlihat juga bahwa terjadi penurunan manfaat sebagai tukar menukar pikiran di mana dalam jangka tiga tahun peran kelompok sebagai sarana tukar pikiran atau pertemuan kelompok sudah berkurang sebesar 6,3%. Guna memperoleh informasi tentang teknologi yang dibutuhkan, sumber informasi didapatkan dari berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber informasi yang paling dominan digunakan oleh petani yaitu dari sesama petani sendiri. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah persen yang terbesar yaitu 61,0% pada tahun 2009 dan menurun menjadi 44,8% pada tahun 2012 (Tabel 7). Sumber informasi kedua adalah kelompok tani, walaupun pada tahun 2012 ada sedikit penurunan persentasenya. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok tani berperan aktif dalam menyampaikan program program dari Pemerintah. Sementara itu, peran PPL sebagai sumber informasi hanya sebesar 8,9% pada tahun 2009 dan selanjutnya meningkat menjadi 12,0% pada tahun 2012. Rendahnya peran penyuluh menurut penelitian Sirait *et al.* (2010) karena penyuluh berperan masih pada kategori/level aktivitas umum saja, belum pada tahap peningkatan standar produktivitas. Peran penyuluhan sebatas sebagai edukasi, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan monitoring dan evaluasi sudah ada.

Ada kecenderungan pada masa yang akan datang peran media sebagai sumber informasi teknologi meningkat. Hal ini terlihat pada tahun 2012 jumlah persen responden untuk media mencapai 7,4%. Peran media paling tinggi terdapat di wilayah berbasis karet, di mana informasi harga karet bisa didapat secara harian melalui media.

Secara umum dapat ditunjukkan bahwa ada kecenderungan sumber informasi dari sesama petani dan kelompok tani menurun, sementara dari media, aparat desa, PPL, pedagang hasil pertanian, maupun sarana produksi semuanya meningkat. Hal

ini menunjukkan bahwa wawasan petani tidak hanya terkungkung dalam lingkup kelompok, tetapi berkembang dalam masyarakat luas yang terkait dengan usaha taninya.

Tabel 7. Sumber Informasi Teknologi Usaha Tani yang Sering Dimanfaatkan Petani, Menurut Wilayah Komoditas Basis, 2009–2012 (% Petani)

Wilayah Komoditas Basis	Sumber Informasi Teknologi Usaha Tani <sup>1)</sup>						
	1	2	3	4	5	6	7
Tahun 2009							
- Karet	16,2	74,5	0,0	4,0	1,8	1,8	1,7
- Kakao	13,6	65,2	3,0	3,0	10,6	1,5	3
- Kelapa sawit	0,0	48,6	6,8	29,7	4,3	5,9	4,6
- Tebu	5,7	55,7	2,7	22,2	10,1	2,2	1,4
Rata-rata	8,9	61,0	3,1	14,7	6,7	2,9	2,7
Tahun 2012							
- Karet	19,8	43,1	1,9	10,4	2,5	6,5	15,8
- Kakao	13,1	37,5	15,3	10,0	18,7	1,3	4
- Kelapa sawit	5,6	47,7	2,1	19,9	11,6	7,7	5,4
- Tebu	9,6	50,7	9,7	15,9	2,6	7,1	4,4
Rata-rata	12,0	44,8	7,3	14,1	8,9	5,7	7,4
Perubahan							
- Karet	3,6	-31,4	1,9	6,4	0,7	4,7	14,1
- Kakao	-0,5	-27,7	12,3	7,0	8,1	-0,2	1,0
- Kelapa sawit	5,6	-0,9	-4,7	-9,8	7,3	1,8	0,8
- Tebu	3,9	-5,0	7,0	-6,3	-7,5	4,9	3,0
Rata-rata	3,2	-16,3	4,1	-0,7	2,2	2,8	4,7

<sup>1)</sup> Keterangan:

1 = PPL 2= sesama petani 3 = aparat desa 4 = kelompok tani 5 = pedagang sarana produksi  
6 = pedagang hasil pertanian 7 = th. 2009 lainnya; th. 2012 media

## KESIMPULAN

Dalam melakukan usaha taninya petani tidak bisa lepas dari hubungan kerja dengan lembaga-lembaga pendukungnya, seperti kelompok tani, pedagang saprodi, pedagang hasil pertanian, penyuluh, koperasi, bank, dan pemerintah daerah. Dalam kaitan ini maka upaya pemberdayaan petani menjadi sangat penting agar petani mempunyai posisi tawar yang tinggi. Di samping itu, pengembangan kios sarana produksi pertanian di daerah perdesaan juga penting untuk meningkatkan aksesibilitas petani terhadap input yang dibutuhkan dan memacu penerapan teknologi usaha tani yang lebih maju. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu membuka kesempatan yang seluas mungkin kepada pengusaha agar kelembagaan sarana produksi di perdesaan berbasis komoditas perkebunan bisa berkembang.

Kelompok tani pada umumnya lebih merupakan kelompok sosial dibanding kelompok usaha pertanian (agribisnis). Kelompok tani belum mempunyai posisi tawar yang kuat untuk kerja sama bisnis dengan pengusaha perkebunan atau industri hasil perkebunan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemberdayaan kelembagaan kelompok tani untuk peningkatan akses informasi, teknologi, input, modal, dan pemasaran hasil secara partisipatif, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Kelembagaan koperasi juga harus lebih diaktifkan lagi sebagai lembaga pendukung yang mampu berperan aktif sebagai pemberi modal/pinjaman, penyalur input pertanian, lembaga pemasaran hasil-hasil pertanian, dan sebagai penghubung dari semua sistem agribisnis.

Peran penyuluh belum optimal dalam pendampingan alih teknologi kepada petani. Menurunnya peran penyuluh antara lain disebabkan belum memadainya jumlah penyuluh untuk pendampingan teknologi di setiap desa dan sarana prasarana penyuluhan yang terbatas. Dalam kaitan ini, diperlukan rekrutmen penyuluh dan pembekalan yang cukup agar mereka mampu melaksanakan tugas dan fungsi penyuluh sebagai pendamping petani dalam menerapkan teknologi budi daya komoditas perkebunan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cahyono, S. dan D.S. Tjokropandojo. 2012. Peran Kelembagaan Petani dalam Mendukung Keberlanjutan Pertanian sebagai Basis Pengembangan Ekonomi Lokal. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota B SAPPK V2N1:15-23*.
- Damanik, S. dan Herman. 2010. Prospek dan Strategi Pengembangan Perkebunan Kakao Berkelanjutan di Sumatera Barat. *Perspektif 9(2):95-105*.
- Handayani. 2013. Kelembagaan Agribisnis. <http://shsiskahandayani.blogspot.com/2013/04/kelembagaan-agribisnis.html> (2 Desember 2014).
- Noviatirida, W. 2011. Analisis Bentuk Kerja Sama Petani dengan Lembaga-Lembaga Pendukung Pengembangan Agribisnis Kakao di Kenagarian Sekujur, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman. Skripsi. Fakultas Pertanian, Universitas Andalas Padang. Padang.
- Sirait, K., Rosnita, dan Arifudin. 2010. Peran Penyuluh dalam Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit Pola Swadaya di Kabupaten Kampar. *JOM Faperta 2(1):1-13*.
- Syahyuti, 2006. 30 Konsep Penting dalam Pembangunan Perdesaan dan Pertanian. PT Bina Rena Pariwisata. Jakarta
- Zulfahmi, M.G.A. 2012. Makalah Pengantar Usaha Tani "Kelembagaan Pendukung Usaha Tani". Universitas Brawijaya. Fakultas Pertanian. Program Studi Agroekoteknologi Malang. <http://kickfahmi.blogspot.com/2012/12/kelembagaan-usaha-tani.html> (12 Juni 2014).
- Syahza, A. 2011. Model Kelembagaan Ekonomi Perkebunan Kelapa Sawit. *Jurnal Manajemen Usahawan Indonesia 40(2):1-28*.